

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

POPI SELVIANA ADELLA
NPM 1903100057

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, oleh :

Nama Mahasiswa : **POPI SELVIANA ADELLA**

NPM : 1903100057

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH., M.SP**

(.....)

PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.**

(.....)

PENGUJI III : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

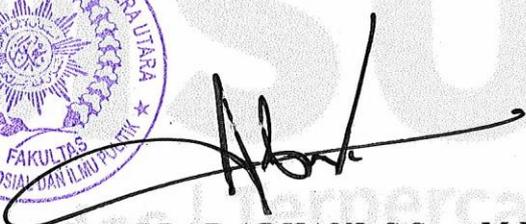
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam uji skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **POPI SELVIANA ADELLA**

NPM : 1903100057

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan

Medan, 6 Juni 2023

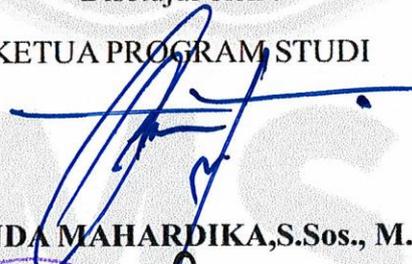
PEMBIMBING



RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.

Disetujui oleh :

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH., M.SP

Unggu... | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Popi Selviana Adella NPM 1903100057, menyatakan dengan sungguh – sungguh :

- 1 Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat, menjiplak, atau mengambil karya orang lain adalah Tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
- 2 Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulis saya sendiri, bukan karya orang lain, karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
- 3 Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah dijiplak untuk memperoleh Kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar Pustaka

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

- 1 Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian Skripsi saya dibatalkan
- 2 Pencabutan Kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 6 Juni 2023

Yang menyatakan



Popi Selviana Adella

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN

Oleh

POPI SELVIANA ADELLA

1903100057

Kemiskinan (poverty) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Meningkatnya kemiskinan dan dalam rangka keseriusan dalam hal pengentasan permasalahan kemiskinan, melakukan kebijakan politik dalam hal penanggulangan kemiskinan wilayah perkotaan, pemerintah kota medan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Medan antara lain yaitu Program bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha dan bantuan perlindungan rasa aman. Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian skripsi saya adalah tentang program bantuan perumahan. Metode peneliitan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumnetasi. Berdasarkan penelitian ini diketahui implementasi peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di kota medan sudah efektif. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat mampu yang menempati rusunawa. Seharusnya rusunawa ditempati oleh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga bisa berjalan dengan baik bantuan program pemerintah. Hal ini yang menjadikan permasalahan tidak tegasnya pihak rusunawa dalam mengatasi hal tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Penanggulangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu”alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia maupun akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis membuat skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengankerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan - rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dalam hidup saya kepada Papa

Syawaluddin tersayang dan Mama Elfina Wati tercinta serta abang dan adik tersayang yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moral serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A. Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan

pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsipenulis.
9. Kepada Dinas Sosial Kota Medan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan pendidikan.

Aamiinyarabbal'amin.

Wasalamu'alaikum wr.wb

Medan, 3 Juni 2023

Popi Selviana Adella

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi	8
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	9
2.3 Penanggulangan Kemiskinan	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Jenis Penelitian	15
3.2 Kerangka Konsep	15
3.3 Definisi Konsep	16
3.4 Kategorisasi	17
3.5 Narasumber.....	18
3.6 Teknik Pengumpulan Data	19
3.7 Teknik Analisis Data	20
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	21
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	21
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Medan	21
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan.....	21
3.9.3 Tujuan dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan	22
3.9.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan.....	31
4.1.2 Faktor Yang Menghambat	39
4.2 Analisis Dan Pembahasan	40
4.2.1 Impelementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan.....	40
4.2.2 Faktor Yang Menghambat	47
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.1.1 Impelementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan.....	51
5.1.2 Faktor Yang Menghambat	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	16
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah penduduk di kota medan.....	3
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : SK-I Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : Sk-II Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran V : Sk-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Sk-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : Sk-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII: Surat Izin Penelitian Universitas
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian BALITBANG
- Lampiran X : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas Sosial Kota Medan
- Lampiran XI : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran XII : Dokumentasi
- Lampiran XIII: Draf Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan (poverty) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak dan perlu dituntaskan serta dicari jalan keluarnya sampai saat ini. Berbagai program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan selama ini baik oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara warga miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga miskin, yaitu hak sosial budaya, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik

pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Tabel 1. 1Jumlah penduduk di kota medan

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Masyarakat Miskin
2018	2.264.145 jiwa	186
2019	2.279.894 jiwa	183.79
2020	2.435.252 jiwa	183.54
2021	2.460.858 jiwa	193.03
2022	2.494.512 jiwa	187.74

Meningkatnya kemiskinan dan dalam rangka keseriusan dalam hal pengentasan permasalahan kemiskinan, melakukan kebijakan politik dalam hal penanggulangan kemiskinan wilayah perkotaan, pemerintah kota medan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan peraturan daerah tersebut dibuat adalah sebagai penjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Kota Medan merupakan salah satu pemerintah kota yang melakukan kebijakan dalam penanganan kemiskinan wilayah perkotaan. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Medan antara lain yaitu Program bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha dan bantuan perlindungan rasa aman.

Pembangunan perumahan sebagai kebutuhan utama bagi masyarakat, harus berujung pada karakter pembangunan Indonesia yang mandiri dan sejahtera sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1), dinyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemerintah menjadi pelaksana tujuan capaian kemajuan kesejahteraan umum, dengan penyediaan hak hidup bagi setiap warga negara. Negara melindungi kebutuhan akan pemenuhan tempat tinggal dalam fungsi-fungsi rumah bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia, termasuk MBR. Pemenuhan tempat tinggal dimaksudkan sebagai pemenuhan fungsi-fungsi rumah sebagai: 1) Tempat tinggal layak huni, 2) Sarana pembinaan keluarga, 3) Pencerminan harkat dan mertabat pemilik rumah, dan 4) Harta yang dapat dicairkan oleh pemilik rumah (UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian skripsi saya adalah tentang program bantuan perumahan. Namun pada kenyataannya

dikarenakan tidak mampu membeli atau menyewa rumah, banyak masyarakat mampu yang menempati rusunawa. Seharusnya rusunawa ditempati oleh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga bisa berjalan dengan baik bantuan program pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan di latar belakang masalah menjadi acuan atau rujukan untuk merumuskan rumusan suatu masalah kebijakan. Maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di kota medan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program bantuan perumahan di kota medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di kota medan?

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program bantuan perumahan di kota medan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

- b. Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu serta dampak bagi masyarakat lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II: URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, sepanjang teori-teori dan/atau data sekunder/tertier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan dasar untuk penelitian kualitatif dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Definisi Operasional (Kuantitatif) /Kategorisasi Penelitian (Kualitatif), Populasi dan sampel (kuantitatif), atau Informan/Narasumber (kualitatif), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V: PENUTUP

Bab penutup akan menguraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian Teoritis merupakan landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Implementasi

Dunn (Putra R.N 2017) implementasi merupakan tindakan – tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah atau swasta.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sore dan Sobirin, 2017) implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung sesudah melewati sejumlah jenjang tertentu seperti jenjang pengesahan undang-undang, selanjutnya output kebijakan dalam bentuk implementasi keputusan dan seterusnya sampai pembetulan kebijakan yang bersangkutan.

Kemudian menurut Nawi (2018) Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang bersifat membangun hubungan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Situmorang Chazali (Amanda 2020) berpendapat bahwa keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variable terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu – isu publik.

Kemudian menurut Wibawa (Tahir,2014) tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula

bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Pressman dan Wildavsky (Purwanto dan Sulistyastuti 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (to complete).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan serta mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik menurut Edward III (Priyatin and Rahmi 2022) sebagai berikut,

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan

dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (penyaluran komunikasi yang baik) kepada personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan haruslah tepat, akurat dan konsisten.

b. Sumber Daya

Meskipun implementasi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan baik, akurat dan tepat, akan tetapi implementasi kebijakan jika para implementator kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kebijakan, implementasi menjadi tidak efektif. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain : Staf, Informasi, Kewenangan, Fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka dapat kemungkinan besar implementasi kebijakan terlaksana sesuai dengan dengan tujuan. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Selanjutnya, untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan, penulis menggunakan teori Edward III seperti yang sudah dijelaskan diatas. Teori ini penulis gunakan sebagai pisau analisis karena teori ini dianggap sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada terkait Implementasi kebijakan. Selain itu, dalam teori ini juga dijelaskan hal-hal yang menghambat impelentasi kebijakan, seperti : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan secara lebih terperinci dan efesien.

2.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah

dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dari penanggulangan kemiskinan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Upaya penanggulangan kemiskinan pada tingkat nasional bisa dilihat dari program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sejak tahun 1969

Departemen Dalam Negeri telah mengelola bantuan pembangunan desa. Tujuannya ialah untuk menggerakkan masyarakat supaya berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui peningkatan kegiatan usaha serta pembangunan sarana dan prasarana dasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

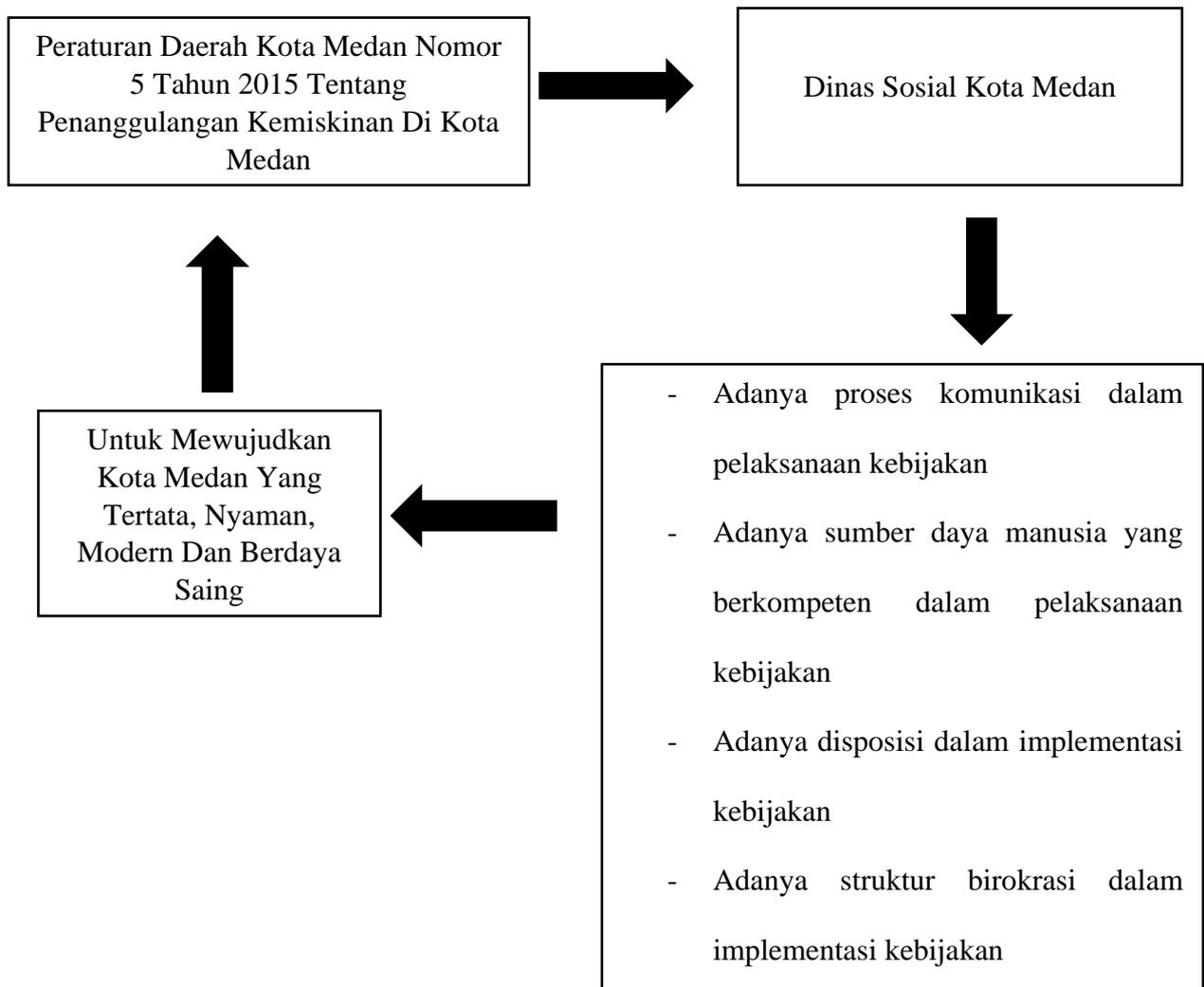
Menurut Saputra, Kusmanto, Turnip (2016) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan.

Menurut Sukmadinata (2017), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

3.2 Kerangka Konsep

kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan.

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dimaksud kedalam variabel agar lebih terarah. Definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang bersifat membangun hubungan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- b. Implementasi Kebijakan Publik merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan serta mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan
- c. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan. Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan
- b. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kebijakan
- c. Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan

- d. Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan di analisis secara kualitatif, maka peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber penelitian ini adalah :

1. Nama : Ananda Sulung Parlaungan, S.STP
 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan : S1
2. Nama : Rizka Anastasia S.E
 Jabatan : Anggota Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan : S1
3. Nama : Bunga Citra, SH, MH
 Jabatan : Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulant Dan Penataan Lingkungan
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : S2
4. Penghuni Rusunawa
 Nama : Suryani
 Umur : 44 Tahun

Pendidikan : SMA

5. Penghuni Rusunawa

Nama : Ardiansyah

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Sugiyono (2018) berpendapat bahwa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikandata kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumberpertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yangdidapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer

b. Data sekunder

Sugiyono (2018) berpendapat bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sugiyono (Saipuddin 2021) Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram aliran, dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan data verifikasi, kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ada di temukan bukti-bukti yang kuat yang

mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Medan. Waktu penelitian Februari 2023

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan Pemerintahan di bidang sosial. Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Dinas Sosial Kota Medan juga melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Bidang Sosial di Kota Medan.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan

Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kota Medan sebagai berikut :

Visi “Kota Medan Menuju Kota Sejahtera Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat”

Misi

Untuk memenuhi visi Dinas Sosial Kota Medan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan social
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja social
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan
4. Mengembangkan system informasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis IT
5. Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)

3.9.3 Tujuan dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.9.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- d. Pelaksanaan Administratif Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya

- e. Pelaksanaan tugas Pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan dan
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Kota Medan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan. Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, dan 9 (sembilan) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

1. Sekretariat

Sekretariat pada Dinas Sosial dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahkan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, antara lain :

a. Kepala Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang membawahkan 3 (tiga) Seksi antara lain :

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup perlindungan sosial korban bencana alam.

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup perlindungan sosial korban bencana sosial.

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi jaminan sosial keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup jaminan sosial keluarga.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup bidang rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang membawahkan 3 (tiga) Seksi antara lain :

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Di Luar Panti dan/ atau Lembaga

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/ atau Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Di Luar Panti dan/ atau Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti dan/ atau Lembaga

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti dan/ atau Lembaga dipimpin oleh Kepala seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti dan/ atau Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan/ atau lembaga.

c. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang membawahkan 3 (tiga) Seksi antara lain :

a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas.

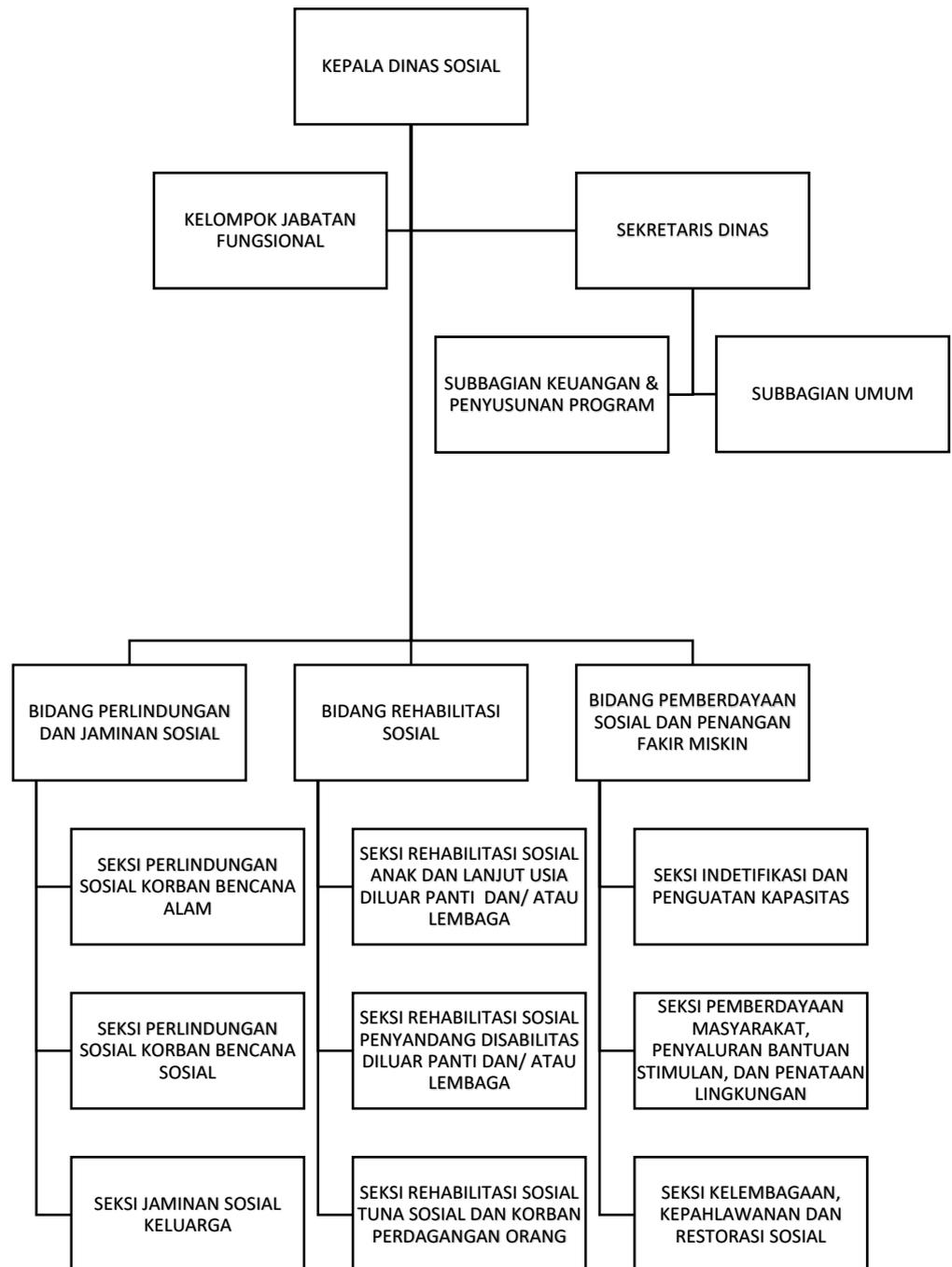
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin lingkup pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

- c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin lingkup kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas serta menyajikan data yang bersumber dari hasil penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulan data dengan melakukan pendekatan kualitatif berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Ada beberapa narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari 3 aparatur dari Dinas Sosial Kota Medan dan 2 orang masyarakat.

4.1.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan

4.1.1.1 Adanya proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan

Ananda Sulung Parlaungan, S.STP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 28 Februari 2023 pukul 8.45 menyatakan

“Saat ini untuk komunikasi yang dilakukan atau dibangun sudah cukup dimulai dari aplikasi supaya informasi tersebut dapat tersampaikan dengan maksimal walaupun kita harus terus menerus berinovasi untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin

canggih dan cepat. Untuk komunikasi secara umum sudah efektif karena sudah banyak masyarakat yg mendapat program bantuan sudah terealisasi dengan sangat baik. Adapun kendala yang terjadi adalah keterbatasan kemampuan kita dalam memenuhi jumlah yang ada atau jumlah yang harus ditanganin dalam anggaran kebijakan”

Rizka Anastasia S.E selaku Anggota Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 28 Februari 2023 pukul 9.30 menyatakan

“Untuk komunikasi apalagi zaman sekarang ya kita sudah pakai media sosial pasti wa, Instagram dan youtube segala informasinya kita masukkan di grup wa ada di youtube kita juga ada supaya informasi informasi kegiatan kita itu dapat diketahui oleh kalangan kita sendiri maupun masyarakat luas. Menurut saya komunikasi yang dilakukan oleh dinas sosial kota medan sudah sangat efektif apalagi sudah banyak program program yang terealisasi. Adapun kendalanya adalah terkadang sering salah pendataan dikarenakan data masyarakat yang tak lengkap”

Bunga Citra, SH, MH selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari rabu 1 Maret 2023 pukul 9.00 menyatakan

“Untuk komunikasi apalagi zaman sekarang ya kita sudah melalui media sosial agar tersampaikan secara merata dan luas kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh dinas sosial kota medan kepada masyarakat sudah sangat efektif. Kendala yang terjadi adalah banyak masyarakat yang masih belum melihat informasi di media sosial jadi penyampaian informasi tidak langsung tersampaikan dengan cepat”

Suryani sebagai penghuni rusun dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 2 Maret 2023 pukul 17.10 menyatakan

“Untuk peraturan tentang penanggulangan kemiskinan saya kurang tau tapi dinas sosial pernah datang untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakatkan tetapi ibu pada saat itu tidak ada jadi kurang tau apa yang dibicarakan”

4.1.1.2 Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kebijakan

Ananda Sulung Parlaungan, S.STP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 28 Februari 2023 pukul 8.45 menyatakan

“Untuk sejauh ini sudah sesuai walaupun masih ditemukan sedikit kendala, jadi tatanan suatu organisasi itu adalah mempersiapkan dirinya terhadap perubahan kedepan, kita gabisa menyiapkan

organisasi itu hanya untuk satu saja kedepan harus bisa kita hipotesa kedepannya akan seperti apa. Untuk fasilitas yang ada pada dinas sosial sampai saat ini sudah terpenuhi dengan baik. Adapun dinas sosial sudah mendapat kewenangan penuh itu sesuai dengan tupoksi seluruh opd dikota medan, penanggulangan kemiskinan dikota medan bukan hak /kewajiban prioritas dari dinas sosial kota medan melainkan seluruh kewajiban bagi instansi terkait yg saling berhubungan bersama sama menjalankannya. Tentunya dinas sosial Pasti bekerjasama artinya sesuai dengan tupoksi masing masing seperti dinas perkim dinas ketenagakerjaan dan dinas lainnya”

Rizka Anastasia S.E selaku Anggota Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 28 Februari 2023 pukul 9.30 menyatakan

“Sumber daya manusia yang ada pada dinas sosial kota medan sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan seiring perkembangan zaman pegawai akan di update secara terus menerus. Fasilitas yang ada saat ini sudah terpenuhi dengan baik. Dinas sosial mendapat kewenangan dalam menjalankan kebijakan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan apalagi demi menyelaraskan visi dan misi pak walikota. Tentunya dinas sosial wajib bekerja sama dengan pihak/dinas terkait dalam mensukseskan suatu program dan

kebijakan seperti dengan dinas kesehatan dinas ketenagakerjaan dinas perkim”

Bunga Citra, SH, MH selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari rabu 1 Maret 2023 pukul 9.00 menyatakan

“Sumber daya manusia yang ada pada dinas sosial kota medan sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. saat ini fasilitas dinas sosial sudah terpenuhi dengan baik. Dinas sosial sudah mendapatkan Kewenangan dalam menjalankan kebijakan yang merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan. Tentunya wajib bekerja sama dengan instansi terkait dalam mensukseskan program dan kebijakan seperti dengan dinas ketenagakerjaan dinas perkim dinas kesehatan”

Suryani sebagai penghuni rusun dalam wawancara yang dilakukan pada hari kamis 2 maret 2023 pukul 17.10 menyatakan

“alasan saya tinggal disini dikarenaenakan tempatnya nyaman, murah sesuai dengan perekonomian keluarga. Untuk masalah tempat tinggal terserah kita atau tergantung kita masih mau tinggal atau tidak, selagi pembayarannya lancer pasti diperbolehkan tinggal, jika pembayarannya nunggak yang pertama akan mendapatkan surat peringatan dan apabila masih belum dibayar akan dilakukan pengusiran secara paksa. Untuk biaya perbulan lantai 1 400 ribu,

lantai 2 350 ribu, lantai 3 300 ribu, lantai 4 195 ribu dan lantai 5 170 ribu. Adapun fasilitas yang diberikan air gratis, kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi. air hidup hanya 4 jam saja setelah itu mati selama 4 jam sampai seterusnya.”

Ardiansyah sebagai penghuni rusun dalam wawancara yang dilakukan pada hari jumat 3 maret 2023 pukul 16.00 menyatakan

“Tinggal dirusun karena murah sesuai dengan perekonomian keluarga. Untuk tempat tinggalnya 1 tahun sekali tandatangan kontrak boleh lanjut atau tidaknya tergantung ada tunggakan atau tidaknya untuk pembayaran bisa dibawa ada kantornya. Untuk biaya perbulan lantai 1 400 ribu, lantai 2 350 ribu, lantai 3 300 ribu, lantai 4 195 ribu dan lantai 5 170 ribu, adapun uang sampah dikutip sebesar 15 ribu perulan. Fasilitas yang disediakan yaitu air gratis, kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi.”

4.1.1.3 Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan

Ananda Sulung Parlaungan, S.STP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 28 Februari 2023 pukul 8.45 menyatakan

“Adapun pelayanan Dinas Sosial Kota Medan kepada masyarakat tentunya masih harus diperbaiki. Dinas sosial Kota Medan harus seoptimal mungkin dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dan dinas

sosial juga mendukung penuh kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan hanya wacana melainkan bentuk nyata bantuan kepada masyarakat sudah tersalurkan”

Rizka Anastasia S.E selaku Anggota Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 28 Februari 2023 pukul 9.30 menyatakan

“pelayanan Dinas Sosial Tetap harus diperbaiki demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Sampai saat ini tidak ada kendala dalam surat tugas/surat perintah pada Dinas Sosial Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan berkomitmen penuh dengan kebijakan yang akan kita jalankan tanpa ada kendala sedikitpun. Dinas sosial juga sangat mendukung penuh kebijakan tersebut apalagi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kota medan”

Bunga Citra, SH, MH selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari rabu 1 Maret 2023 pukul 9.00 menyatakan

“Pelayanan Dinas Sosial Kota Medan sudah sangat bagus dan tetap harus diperbaiki demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam surat tugas/surat perintah pada Dinas Sosial Kota Medan untuk pelaksanaanya tidak ada kendala. sikap Dinas Sosial

Kota Medan dalam menjalankan kebijakan sangat konsisten tentunya. Dinas sosial tentunya sangat mendukung penuh kebijakan tersebut”

4.1.1.4 Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan

Ananda Sulung Parlaungan, S.STP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 28 Februari 2023 pukul 8.45 menyatakan

“Kalau pejabat/birokrat ditempah sesuai dengan porsinya masing masing. setiap unit yang ada di Dinas Sosial saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik. Pasti, kalau kendala pasti ada tapi itukan hanya bagian dari rutinitas dan komunikasi kalau kendala pasti ada, gamungkin gaada contohnya dalam pendataan masyarakat yg mendapat bantuan dan ketika org tersebut sudah terdata dan pada saat pemberi bantuan langsung ternayata orang itu sudah meninggal maka hal tersebut menjadi kenadala karena bantuan tersebut atas nama dia dan tidak bsia diwakilkan untuk penerimanya.”

Rizka Anastasia S.E selaku Anggota Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa 28 Februari 2023 pukul 9.30 menyatakan

“Alhamdulillah untuk pegawai yang ada pada dinas sosial sudah bekerja pada bidangnya masing-masing. Dinas Sosial tentunya saling

berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik. Pasti, kalau kendala pasti ada tapi itu hanya bagian dari rutinitas dan komunikasi seperti pendataan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan”

Bunga Citra, SH, MH selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari rabu 1 Maret 2023 pukul 9.00 menyatakan

“untuk pegawai yang ada pada dinas sosial sudah bekerja sesuai bidangnya. tentu dinas sosial bekerjasama dengan baik agar setiap kebijakan terlaksana dengan lancar. Pasti, kalau kendala pasti ada tapi setiap harinya akan terus diperbaiki contohnya miss komunikasi kepada pegawai juga pasti terjadi”

4.1.2 Faktor Yang Menghambat

Penanggulangan Kemiskinan merupakan hal sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Dengan adanya penanggulangan maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat terpenuhi dan dapat diimpelentasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ananda Sulung Parlaungan, S.STP menyatakan untuk proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah efektif hanya saja penyampaian kepada masyarakat masih sering terjadi kesalahpahaman terkait peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan ini. Oleh karenanya pada dinas akan

terus berulang ulang menyampaikan informasi tersebut hingga tepat sasaran.

4.2 Analisis Dan Pembahasan

Pada sub bab ini, berdasarkan dari hasil penyajian data yang dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik wawancara kepada narasumber penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan

4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan

4.2.1.1 Adanya proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Edward III (Priyatin and Rahmi 2022): Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan

implementasi harus ditransmisikan (penyaluran komunikasi yang baik) kepada personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan haruslah tepat, akurat dan konsisten.

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan harus didukung oleh berbagai pihak terkait, seperti koordinasi antara Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Satpol PP Kota Medan.

Berdasarkan asumsi teori diatas meyakinkan penulis bahwa komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan sangat berpengaruh besar terhadap jalannya suatu kebijakan. Adapun komunikasi yang terjadi pada Dinas Sosial Kota Medan sudah efektif, bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu dengan dilakukannya sosialisasi serta penyampaian informasi melalui media sosial. Disisi lain fakta menunjukkan bahwa dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan belum paham mengenai informasi yang sudah disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Medan apalagi banyak juga kendala yang muncul pada saat pendataan. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman informasi yang terjadi.

Kejadian ini dibuktikan dengan adanya wawancara yang penulis lakukan pada pak Ananda Sulung Parlaungan, S.STP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan. Saat ini untuk komunikasi yang dilakukan atau dibangun sudah cukup dimulai dari aplikasi supaya informasi tersebut dapat tersampaikan dengan maksimal walaupun kita harus terus secara terus menerus berinovasi untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan cepat. Untuk komunikasi secara umum sudah efektif karna sudah banyak masyarakat yg mendapat program bantuan sudah terealisasi dengan sangat baik. Adapun kendala yang terjadi adalah keterbatasan kemampuan kita dalam memenuhi jumlah yang ada atau jumlah yang harus ditanganin dalam anggaran kebijakan

4.2.1.2 Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kebijakan

Salah satu faktor yang menentukan terlaksananya kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam hal bantuan perumahan di Kota Medan yaitu Sumber Daya pada Dinas Sosial Kota Medan. Sumber daya yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya bentuk finansial. Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Edward III (Priyatin and Rahmi 2022): Meskipun implementasi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan baik, akurat dan tepat, akan tetapi implementasi kebijakan jika para implementator kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kebijakan, implementasi menjadi tidak efektif. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain : Staf, Informasi, Kewenangan, Fasilitas.

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

- a. Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing masing unit dalam hal menangani masalah.
- b. Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.
- c. Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan;
- d. Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, berupa fasilitas kantor, alat-alat penyimpan data/Perlengkapan media tradisional, gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya

Berdasarkan asumsi teori diatas meyakinkan penulis bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan pada Dinas Sosial Kota Medan masih belum efektif. jadi untuk kedepannya mempersiapkan dirinya terhadap perubahan kedepan, sehingga tidak bisa menyiapkan organisasi itu hanya untuk satu saja kedepan harus bisa kita hipotesa kedepannya akan seperti apa. Hal tersebutlah yang bisa mempengaruhi kinerja pegawai dalam implementasi kebijakan. Terkait fasilitas dan wewenang yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah efektif.

Hal ini terbukti dengan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pak Ananda Sulung Parlaungan, S.STP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan sebagaimana telah diuraikan pada hasil diatas. Dinas Sosial Kota Medan dalam hal sumber daya manusia akan terus dilakukan peningkatan secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih.

4.2.1.3 Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan

Menurut Edward III (Priyatin and Rahmi 2022) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka

dapat kemungkinan besar implementasi kebijakan terlaksana sesuai dengan dengan tujuan. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sikap pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Medan dan keterlibatan instansi-instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam setiap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas meyakinkan penulis bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan pada Dinas Sosial Kota Medan sudah berjalan dengan efektif. Sejauh ini pelayanan yang ada pada Dinas Sosial sudah sangat memuaskan bagi masyarakat, sehingga dapat dimengerti dan dipahami banyak orang dalam melaksanakan disposisi.

Hal ini terbukti dengan adanya wawancara yang penulis lakukan pada pakAnanda Sulung Parlaungan, S.STP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan. Pelayanan kepada masyarakat tentunya masih akan terus diperbaiki demi mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan bagi masyarakat. Dinas Sosial Kota Medan harus seoptimal mungkin dalam menjalankan kebijakan tersebut dan juga mendukung penuh kebijakan

penanggulangan kemiskinan bukan hanya wacana melainkan bentuk nyata bantuan kepada masyarakat sudah tersalurkan.

4.2.1.4 Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan

Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Salah satu syarat yang mendukung berjalannya implementasi kebijakan dengan efektif yaitu di perlukannya standar operasional prosedur pembuatan kerja.

Menurut Edward III (Priyatin and Rahmi 2022) Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas meyakinkan penulis bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pada Dinas Sosial Kota Medan sudah efektif, dibuktikan dengan adanya SOP kerja. Namun untuk kedepannya dinas sosial wajib mengkaji ulang terhadap struktur birokrasi yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini terbukti dengan adanya wawancara yang penulis lakukan pada pakAnanda Sulung Parlaungan, S.STP selaku Kepala Bidang

Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan. Kalau pejabat/birokrat ditempat sesuai dengan porsinya masing masing. Setiap unit yang ada di Dinas Sosial saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik.

4.2.2 Faktor Yang Menghambat

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Pada Dinas Sosial Kota Medan sudah menjalankan kebijakan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan, adapun salah satu program yang menjadi focus pada penelitian ini yaitu mengenai bantuan perumahan bagi masyarakat miskin sudah terjalankan dengan efektif pada dinas sosial namun yang masih menjadi kendala dalam yaitu pada penghuni rusunawa yang dapat dikatakan sudah sejahtera dan mampu dalam kebutuhan sehari harinya tetap memilih tinggal di rusunawa. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di rusunawa terbukti tidak tegas dan masih lemahnya kebijakan yang diterapkan kepada penghuni rusunawa terkait aturan tempat tinggal dikarenakan banyak yang sudah sejahtera hidupnya. Adapun tarif untuk tinggal di rusunawa tersebut yaitu lantai 1 sebesar Rp.

400.000, lantai 2 sebesar Rp. 350.000, lantai 3 sebesar Rp. 300.000, lantai 4 sebesar Rp. 195.000, lantai 5 sebesar Rp. 170.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.1.1 Mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di kota medan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan sudah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya :

a. Komunikasi

komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan sangat berpengaruh besar terhadap jalannya suatu kebijakan. Adapun komunikasi yang terjadi pada Dinas Sosial Kota Medan sudah efektif, bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu dengan dilakukannya sosialisasi serta penyampaian informasi melalui media sosial. Disisi lain fakta menunjukkan bahwa dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan belum paham mengenai informasi yang sudah disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Medan apalagi banyak juga kendala yang muncul pada saat pendataan. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman informasi yang terjadi.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan pada Dinas Sosial Kota Medan masih belum efektif. jadi untuk kedepannya mempersiapkan dirinya terhadap perubahan kedepan, sehingga tidak bisa menyiapkan organisasi itu hanya untuk satu saja kedepan harus bisa kita hipotesa kedepannya akan seperti apa. Hal tersebutlah yang bisa mempengaruhi kinerja pegawai dalam implementasi kebijakan. Terkait fasilitas dan wewenang yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah efektif

c. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian diatas meyakinkan penulis bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan pada Dinas Sosial Kota Medan sudah berjalan dengan efektif. Sejauh ini pelayanan yang ada pada Dinas Sosial sudah sangat memuaskan bagi masyarakat, sehingga dapat dimengerti dan dipahami banyak orang dalam melaksanakan disposisi.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas meyakinkan penulis bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pada Dinas Sosial Kota Medan sudah efektif, dibuktikan dengan adanya SOP kerja. Namun untuk kedepannya dinas sosial wajib mengkaji ulang terhadap struktur birokrasi yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

5.1.2 kendala yang dihadapi dalam implementasi program bantuan perumahan di kota medan

Terdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan seperti kesalahpahaman penyampaian informasi kepada atau belum langsung paham masyarakat atas informasi yang diterima. Faktor sumber daya dalam hal sumber daya manusia akan terus dilakukan peningkatan secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih. Selanjutnya faktor disposisi yang ada pada Dinas Sosial sudah sangat memuaskan bagi masyarakat, sehingga dapat dimengerti dan dipahami banyak orang dalam melaksanakan disposisi. Dan faktor struktur birokrasi sudah efektif, Namun untuk kedepannya dinas sosial wajib mengkaji ulang terhadap struktur birokrasi yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dinas Sosial Kota Medan dalam proses implementasi kebijakan terdapat faktor yang menghambat keberhasilan suatu kebijakan yaitu kesalahpahaman penyampaian informasi. Komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan sudah dijalankan dengan baik namun belum semua masyarakat langsung paham, hal tersebut yang menjadi kendala atau penghambat dalam melaksanakan suatu kebijakan. Salah satu program yang menjadi focus pada penelitian ini yaitu mengenai bantuan perumahan bagi masyarakat miskin sudah dijalankan dengan efektif pada dinas sosial. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di rusunawa terbukti tidak tegas dan masih lemahnya kebijakan yang diterapkan kepada

penghuni rusunawa terkait aturan tempat tinggal dikarenakan penghuni rusunawa yang dapat dikatakan sudah sejahtera dan mampu dalam kebutuhan sehari-harinya tetap memilih tinggal di rusunawa.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran atau rekomendasi terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan agar menjadi bahan pertimbangan pada dinas terkait untuk dipahami dan menjadi bahan masukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

1. Diharapkan Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan tepat sasaran agar masyarakat lebih mengetahui tentang adanya program bantuan dalam menanggulangi kemiskinan.
2. Diharapkan untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam segi kualitas maupun kuantitas pada Dinas Sosial Kota Medan agar dapat menjalankan semua kebijakan tanpa adanya kendala kekurangan pegawai yang sedang dibutuhkan.
3. Diharapkan Dinas Sosial Kota Medan terus melakukan peningkatan dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat agar bisa menjadi kepercayaan publik.
4. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Medan agar memberikan komunikasi yang efektif dan secara terus menerus kepada

masyarakat merata agar masyarakat mengetahui informasi tentang adanya program bantuan dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

5. Diharapkan pihak rusunawa agar lebih tegas dalam mengambil kebijakan terkait aturan tempat tinggal yang sesuai dengan kriteria agar banyak masyarakat yang kurang mampu bisa menempati rusunawa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Raviansyah, dkk. (2022) *Kebijakan Publik*. Padang : PT. GLOBAL EKSEKUTIF
TEKNOLOGI ANGGOTA IKAPI No. 033/SBA/2022

Jurnal :

Amil, Badan, Zakat Nasional, and D I Kabupaten. 2021. “Implementasi Program
Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten
Maros.” 2.

A.RAHMAWATI. 2020. “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan
Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone.”

Amanda, Permatasari Iman. 2020. “Kebijakan Publik (Teori, Analisis,
Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan).” *TheJournalish: Social and
Government* 1: 34–38.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>.

ASTUTI, DIAH PURBO. 2022. “EVALUASI MODEL CIPP PROGRAM
DIKLAT BERJENJANG TINGKAT DASAR UNTUK MENINGKATKAN
KOMPETENSI PENDIDIK ANAK USIA DINI DI KOTA
PAYAKUMBUH.” *inovasi penelitian* 2(8.5.2017): 2003–5.

Firdaus, Idos. 2019. “Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput
Kabupaten Pandeglang.” <http://eprints.untirta.ac.id/1438/>.

Hayati, Ika, Aini Kusniawati, and Mukhtar Abdul Kader. 2020. “PENGARUH

TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Pada Pegawai ASN RSUD Kabupaten Ciamis).” *Business Management and Entrepreneurship Journal* 2(September): 106–15.

Imron, Imron. 2019. “Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang.” *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)* 5(1): 19–28.

Jamrizal, Jamrizal. 2022. “(LITERATURE REVIEW MANAJEMEN PENDIDIKAN).” 3(1).

Patel. 2022. “Pengaruh Pengawasan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Organization Citizenship Behavior Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Indra.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5(2): 9–25.

Priyatin, Nuke Nur, and Notika Rahmi. 2022. “Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020.” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3(2): 86–96.

Saipudin. 2021. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA TELAGA WARU KEC. PERINGGABAYA KAB.LOMBOK TIMUR TAHUN 2020.”

Saputra, A., Kusmanto, H., & Turnip, K. (2016). Implementation of the Minister

of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the Development of Student Organizations Agung. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 6(1), 1–21.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1052>

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.

Web :

<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/05/19/strategi-penanggulangan-kemiskinan/>

Dokumen Resmi

Putra R.N. 2017. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Di Smk Negeri 1 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.”

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

DOKUMENTASI







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 15 Desember 2022.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Popi Selviana Adella
 N P M : 1903100057
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 133,0 sks, IP Kumulatif 3,72

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan kemiskinan Di kota Medan	15/12 2022 / <i>[Signature]</i>
2	Implementasi Peraturan Bupati Tentang kegiatan Penanganan kemiskinan Di Kabupaten Karo	
3	Implementasi Reformasi Birokrasi Di kantor Pertanahan kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 15 Desember 2022

Ketua, *[Signature]*

(*[Signature]*)

NIDN: 0122110001

Pemohon

[Signature]
 (Popi Selviana Adella)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

(*[Signature]*)

NIDN:

pb: RAHMAN NALAR RIZKY



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1868/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **15 Desember 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **POPI SELVIANA ADELLA**
N P M : 1903100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 008.19.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Desember 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 22 Djumadil Awwal 1444 H
16 Desember 2022 M

Dekan,



Dr. ARIF SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 12 Januari 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Popi Selviana Adella
N P M : 1903100057
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1868.../SK/II.3/UMSU-03/F/2022.. tanggal 16 Desember 2022 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penanggulangan Kemiskinan Di kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

RAFILOAH NAWAR PIZRY M.P.A.

Pemohon,

Popi Selviana Adella

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 367/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	PRIO ADITYA PRABOWO	1803100065	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI
2	IBNU SAID	1703100021	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN
3	YUSRIL AZMI TUMANGGER	1803100037	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BISKANG
4	POPI SELVIANA ADELLA	1903100057	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN
5	AMELIA LESTARI HASIBJAN	1903100064	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS LURAH TERHADAP KINERJA KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN BANTAN TIMUR

Medan, 28 Rabiul Akhir 1444 H
 25 Januari 2023 M



Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan

Peneliti

Nama : Popi Selviana Adella

Npm : 1903100057

Program studi : Ilmu Administrasi Publik

ACC
13 Februari 2023


- a. Adanya proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan
 1. Menurut bapak/ibu bagaimana upaya komunikasi dalam implementasi kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kota Medan yang tertata, nyaman, modern dan berdaya saing?
 2. Apakah komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah efektif bagi masyarakat? (jawaban Iya/tidak harus ada alasannya)
 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses komunikasi dalam implementasi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan antara dinas sosial kota medan dengan masyarakat? (sebutkan dan jelaskan)
- b. Adanya sumber daya yang berkompeten dalam pelaksanaan kebijakan
 1. Menurut bapak/ibu apakah sumber daya manusia (terkait staff) yang ada di dinas sosial kota medan sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan?
 2. Apakah fasilitas yang ada pada Dinas Sosial Kota Medan sudah terpenuhi dengan baik? (jelaskan)
 3. Apakah Dinas Sosial Kota Medan sudah mendapatkan kewenangan penuh terkait implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan? Jelaskan.
 4. Apakah Dinas Sosial harus berbagi kewenangan atau bekerjasama dengan Dinas lainnya? (sebutkan dinas apa, dan jelaskan mengapa)
 5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Medan terkait sumber daya? (staff, informasi, kewenangan, dan fasilitas), jelaskan
- c. Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan
 1. Bagaimana pelayanan Dinas Sosial Kota Medan kepada masyarakat?
 2. Dalam pelaksanaannya apakah ada kendala dalam surat tugas/surat perintah pada Dinas Sosial Kota Medan?
 3. Bagaimana sikap Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan kebijakan tersebut?
 4. Apakah Dinas Sosial mendukung penuh kebijakan penanggulangan kemiskinan? (dalam bentuk apa? Dan jelaskan)
- d. Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan
 1. Bagaimana dengan struktur birokrasi pada Dinas Sosial Kota Medan dalam hal pengawasan rusunawa?

2. Dalam pelaksanaannya apakah pegawai sudah sesuai bekerja dalam bidangnya masing-masing?
3. Bagaimana koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan?
4. Apakah setiap unit yang ada di Dinas Sosial saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik? Jelaskan
5. Apakah ada kendala dalam koordinasi tersebut? Misalnya apa? Dan mengapa kendala tersebut bisa terjadi.
6. Apakah ada kendala dalam birokrasi ? misalnya birokrasi yang ribet. Jika ada, jelaskan alasannya.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul: Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Popi Selviana Adella
 N P M : 1903100057
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015
 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09 Januari 2023	Bimbingan Proposal Bab 1	
2.	11 Januari 2023	Bimbingan Bab 2	
3.	14 Januari 2023	Bimbingan Bab 3	
4.	5 Februari 2023	Bimbingan Bab 3 (Revisi)	
5.	13 Februari 2023	ACC Draft Wawancara	
6.	28 April 2023	Bimbingan Skripsi Bab 4	
7.	5 Mei 2023	Bimbingan Bab 5	
8.	20 Mei 2023	ACC Skripsi	

Medan,20 Mei.....2023...

Dekan,
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
 NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

Aranda Mahardika, S.Sos., MSP
 NIDN : 0122118801

Pembimbing,

Rafiqah Nalar Rizky, S.Sos., M.Si
 NIDN : 0104098707





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 241/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 25 Rajab 1444 H
16 Februari 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Balibang Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **POPI SELVIANA ADELLA**
N P M : 1903100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Deklarasi





PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A.H.Nasution No. 32 Medan Kode Pos 20233
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 070/ 301 /BRIDA/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 241/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023. Tanggal: 16 Februari 2023. Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian kepada :

Nama : Popi Selviana Adella.
NPM : 1903100057.
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan."
Lokasi : Dinas Sosial Kota Medan.
Lamanya : 1 (satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (bridamedan@gmail.com).
5. Surat Keterangan penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat Keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T.B. Simatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1093.A

Berdasarkan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor: 070/301/BRIDA/2023 Tanggal 22 Februari 2023 Hal Permohonan Izin Penelitian dengan ini Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Popi Selviana Adella
NPM : 1903100057
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan”

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.

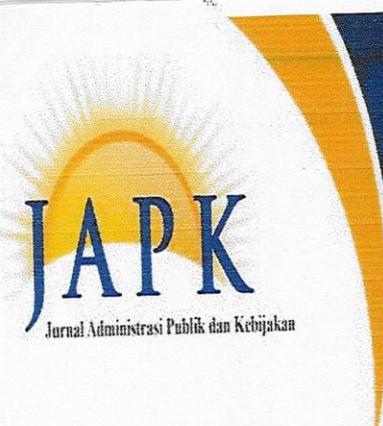
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 03 Mei 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN**



KHOIRUDDIN, S.Sos, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701117 199007 1 001



JAPK

Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan

JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

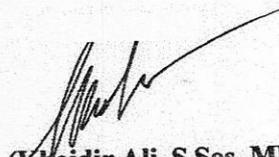
LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Popi Selviana Adella

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 3 No 1 Juny (2023). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, May 20, 2023

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 733/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

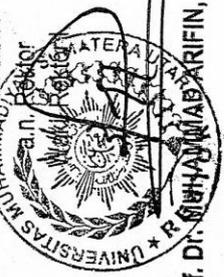


No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	AMELIA LESTARI HASIBUAN	1903100064	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS LURAH TERHADAP KINERJA KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN BANTAN TIMUR
7	POPI SELVIANA ADELLA	1903100057	Dr. ARIFIN SALEH., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN
8						
9						
10						

Notulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Medan, 02 Dzulqaidah 1444 H
22 Mei 2023 M